



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

2018

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

2018



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama BPS sebagai unit kerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target di lingkup Sekretariat Utama yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Sekretariat Utama BPS.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018, perkembangan capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap periode Renstra sebelumnya, capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap target Renstra Sekretariat Utama BPS 2015-2019, serta penyerapan anggaran Sekretariat Utama BPS 2018. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Sekretariat Utama BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa mendatang sangat kami hargai.

Jakarta, 27 Februari 2019

BADAN PUSAT STATISTIK

Sekretaris Utama,



Adi Lumaksono

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	4
1.3 Landasan Hukum	6
1.4 Sumber Daya Manusia	7
1.5 Harapan dan Tantangan	9
BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja	11
2.1 Rencana Strategis 2015-2019	13
2.2 Indikator Kinerja Utama	17
2.3 Anggaran Tahun 2018	20
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2018	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	25
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018	27
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Renstra 2015-2019	36
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018	42
Bab IV Penutup	45
Lampiran	49

DAFTAR TABEL

Tabel

1	Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretaris Utama.....	18
2	Pagu Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan dan Kegiatan (Unit Eselon II) Tahun Anggaran 2018 (Juta Rupiah)	20
3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2018	21
4	Rata-rata Capaian Kinerja Sestama Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2018	25
5	Capaian Kinerja Tujuan Pertama Sekretariat Utama: Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel Tahun 2018	27
6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sestama BPS Tahun 2018 dengan Target Renstra Tahun 2018 dan 2019	37
7	Realisasi Pagu Sekretariat Utama menurut jenis Belanja TA 2018 (Miliar Rupiah)	40
8	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Menuru Program dan Kegiatan/Unit Eselon II Tahun 2018 (Miliar Rupiah)	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1	Struktur Organisasi Sekretariat Utama	6
2	Proporsi Pegawai menurut Unit Kerja	8
3	Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	8
4	Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS 2015- 2019	14
5	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	15
6	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 – 2018	26
7	Predikat Akuntabilitas Keuangan BPS Tahun 2012-2017	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1	Rencana Strategis Sekretariat Utama BPS Tahun 2015-2019	51
2	Pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2018	55
3	Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2018	59
4	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Pusat Statistik Keadaan: Akhir Tahun 2018	61
5	Jumlah Pegawai BPS di Lingkungan Sekretariat Utama Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018	63



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas yaitu lengkap, akurat, mutakhir (*up to date*), berkelanjutan, dan relevan dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, terutama dalam hal pelayanan data dan informasi statistik, BPS dituntut untuk terus memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Hal ini tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis statistik, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, serta dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Di dalam lingkup BPS, Sekretariat Utama (Sestama) merupakan unit kerja eselon I BPS yang melaksanakan kegiatan BPS bersifat non teknis (administratif), seperti kegiatan perencanaan dan penganggaran, kegiatan administrasi terkait pengelolaan keuangan, kegiatan terkait pengembangan sumber daya manusia, kegiatan terkait sosialisasi kegiatan statistik BPS (kehumasan), dan sebagainya. Dengan kata lain, keberadaan unit kerja Sekretariat Utama sangat menunjang keberhasilan kegiatan teknis statistik BPS.

Fungsi Sekretariat Utama BPS dijalankan melalui dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). Adapun aktivitas Sekretariat Utama BPS antara lain Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPS, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Standar Kompetensi, Pembinaan Jabatan Fungsional, Pengembangan Pegawai, Kampanye/Edukasi Publik, Penatausahaan BMN BPS, Diklat Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional, dan Penyelenggaraan Program D-IV.

Untuk mengukur keberhasilan Sekretariat Utama BPS dalam pencapaian kegiatan tahun 2018, maka pada awal tahun telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2018. Target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS 2018. Sedangkan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BPS 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja selama setahun. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama BPS periode 2015-2019, sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Utama BPS berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Sekretariat Utama BPS mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama BPS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
- 2) Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPS;
- 3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS;
- 4) Pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPS;
- 5) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.

c. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, dan fungsinya, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama BPS yaitu:

1) Biro Bina Program

Biro Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik.

2) Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.

3) Biro kepegawaian

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, dan jabatan fungsional.

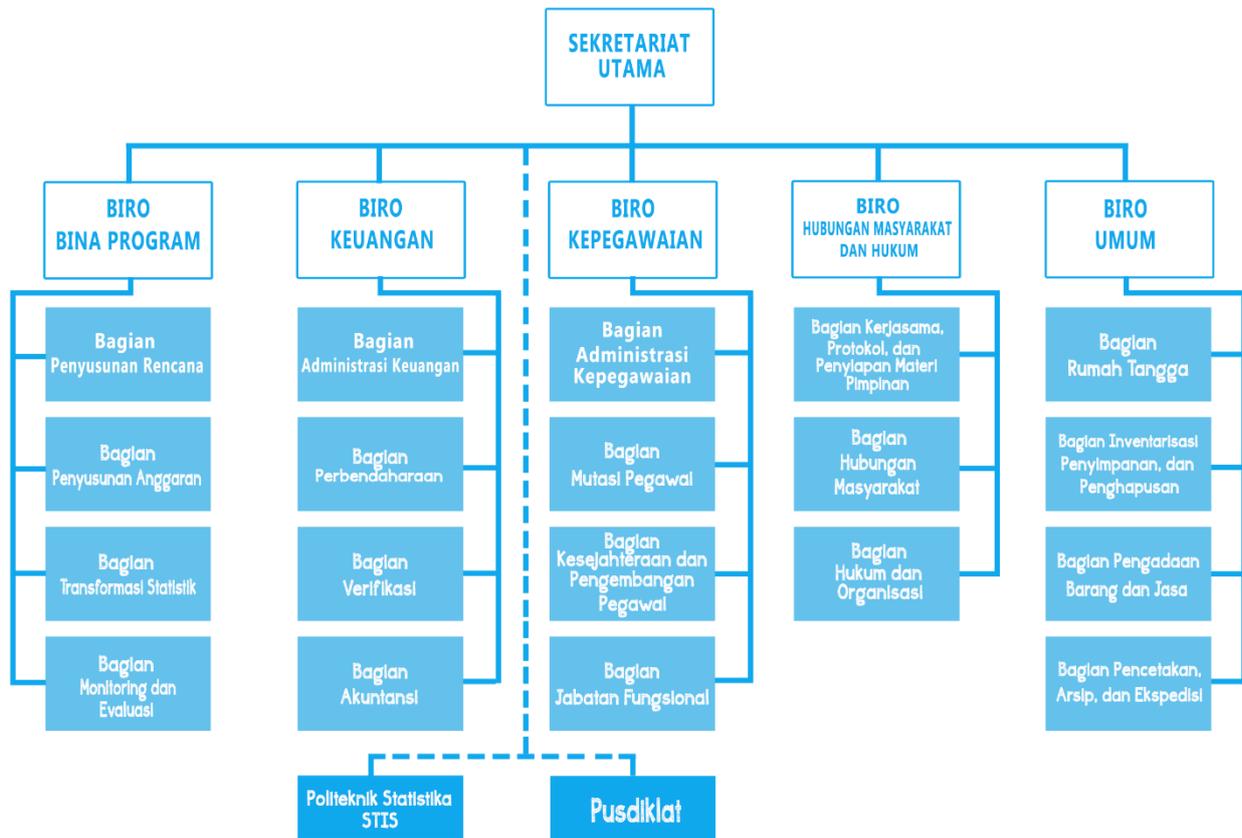
4) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.

5) Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, layanan pengadaan, arsip, ekspedisi, dan penggandaan.

Struktur organisasi Sekretariat Utama BPS secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama

1.3 Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama BPS dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

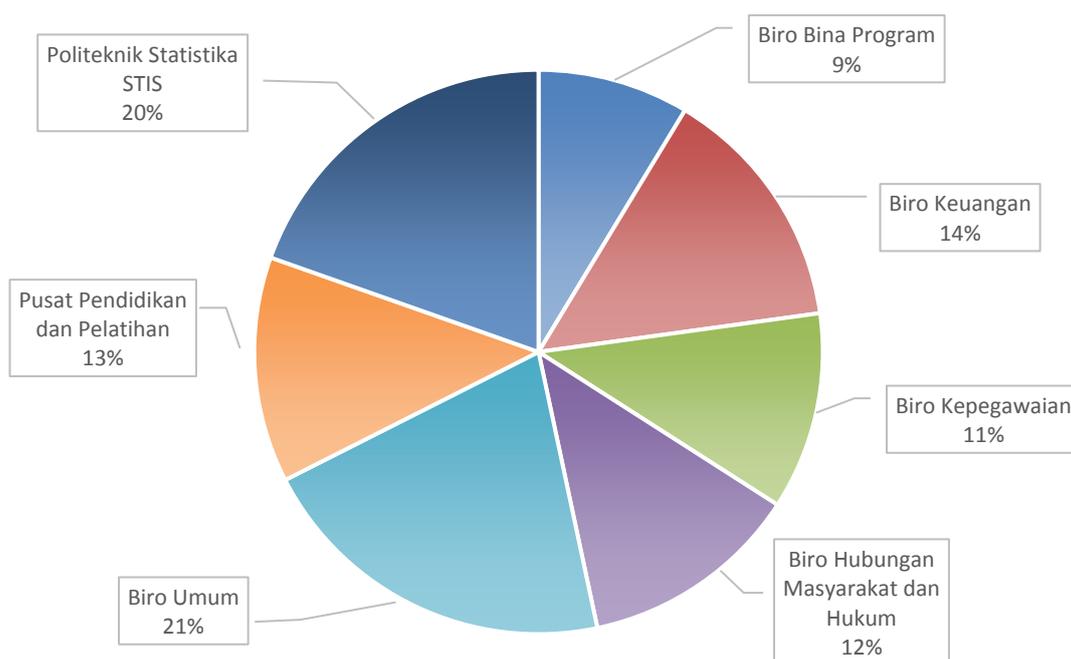
- 1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Sttaistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- 5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Sttaistik Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.

1.4 Sumber Daya Manusia

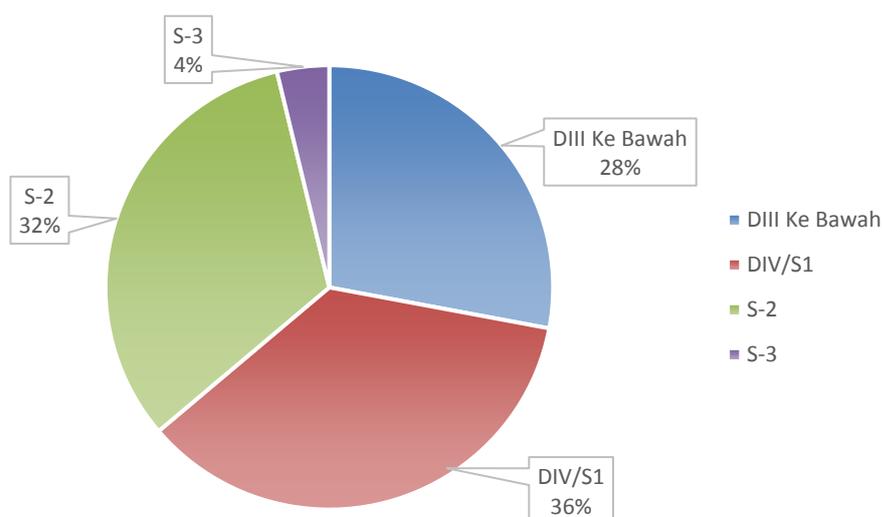
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Dengan kata lain, sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Tentunya sumber daya manusia dengan kualitas dan kapabilitas yang baik yang diharapkan suatu organisasi. Tahun 2018 (31 Desember 2018), jumlah pegawai di lingkup Sekretariat Utama BPS yaitu sebanyak 558 orang termasuk Sekretaris Utama, dengan komposisi untuk masing-masing unit kerja sebagai berikut:

a. Sekretaris Utama	1 orang
b. Biro Bina Program	48 orang
c. Biro Keuangan	79 orang
d. Biro Kepegawaian	63 orang
e. Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	70 orang
f. Biro Umum	116 orang
g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan	72 orang
h. Politeknik Statistika STIS	109 orang



Gambar 2. Proporsi Pegawai menurut Unit Kerja

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa alokasi pegawai terbanyak ada pada unit kerja Biro Umum dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dengan persentase masing-masing 21 % (116 orang) dan 20% (109 orang), sedangkan yang paling sedikit pegawainya adalah Biro Bina Program sebanyak 9 persen (48 orang). Hal ini sesuai dengan kebutuhan pegawai untuk menangani pekerjaan pada unit kerja masing-masing. Sementara itu komposisi Pegawai di Sekretariat Utama menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Secara umum jika dilihat menurut tingkat pendidikan maka jumlah terbesar adalah pegawai dengan pendidikan DIV/S1 yaitu sebanyak 200 pegawai (36 persen). Selanjutnya pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 181 orang (32 persen) dan DIII ke bawah jumlahnya 156 orang (28 persen). Terakhir, pegawai dengan pendidikan S3 sebanyak 21 pegawai (4 persen). Informasi lebih lengkap tentang jumlah pegawai di lingkungan Sestama menurut pendidikan dapat dilihat pada lampiran 6.

1.5 Harapan dan Tantangan

Menjawab harapan dan tuntutan terhadap pelayanan prima di Bidang Administrasi menjadi tantangan untuk meningkatkan peran Sekretariat Utama BPS sebagai unit organisasi yang melayani dan menjalankan tugas di bidang administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang teknis. Tantangan perubahan yang dihadapi Sekretariat Utama BPS antara lain:

1. Tuntutan pemerintah agar Kementerian/Lembaga memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*, yang bisa dilakukan antara lain:

- Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan BPS.
 - Peningkatan perencanaan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan yang direncanakan dan tepat guna.
2. Amanat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, yang menyatakan bahwa fungsi Sekretariat Utama adalah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, sinkronisasi, integrasi, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Hal ini bisa dilakukan antara lain:
- Peningkatan koordinasi antar unit di bawah lingkungan Sekretariat Utama BPS dalam penyelenggaraan administrasi pendukung kegiatan statistik yang saat ini masih belum optimal.
 - Peningkatan mutu Politeknik Statistika STIS agar tenaga statistik profesional yang dihasilkan mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju.
 - Peningkatan mutu penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM aparatur BPS maupun instansi pemerintah.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang layak termasuk Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk seluruh satker BPS secara bertahap dan berdasarkan prioritas.
 - Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen Pan dan RB) dalam melakukan penataan kelembagaan BPS.
 - Peningkatan kerjasama dengan Kantor Statistik Negara lain sebagai upaya pembenahan bisnis proses kelembagaan efektif dan efisien yang mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)* yang menjadi standar yang dianut oleh kantor statistik di dunia.



BAB II

RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019 Sekretariat Utama BPS

Sekretariat Utama BPS, dalam melakukan tugasnya selama lima tahun kedepan, telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BPS tahun 2015-2019 yang tentunya mengacu pada Renstra BPS Tahun 2015-2019. Renstra Sekretariat Utama BPS 2015-2019 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Utama BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BPS tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Visi

Sekretariat Utama BPS mempunyai visi yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Administrasi yang efektif, efisien, terpadu, dan berkualitas”.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka Sekretariat Utama BPS menentukan misi yaitu:

- 1) Menyediakan informasi dan layanan administrasi yang prima, berkualitas, efektif dan efisien bagi pemanfaat layanan dan *stakeholder*;
- 2) Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan administrasi dalam kerangka pelaporan yang andal, efektif, dan efisien; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan sistem administrasi yang berlaku.

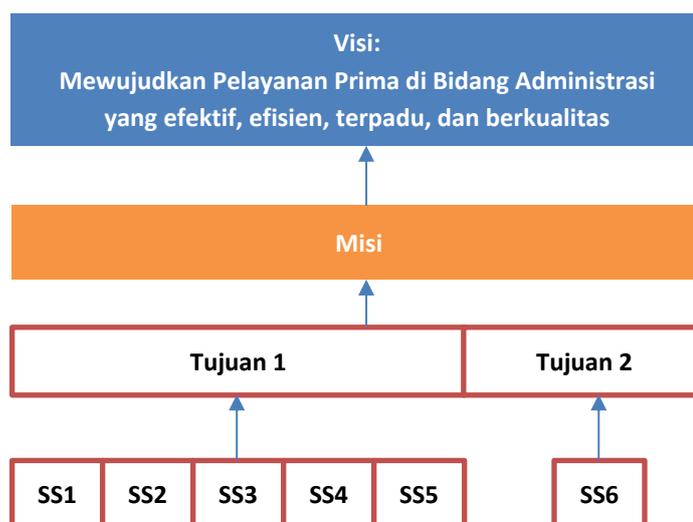
c. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS

Sekretariat Utama BPS mempunyai tiga tujuan yang dicanangkan dalam Renstra Sekretariat Utama BPS periode 2015-2019. Tujuan Sekretariat Utama BPS tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS 2015-2019

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauhmana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS dapat terlihat pada gambar 5.



Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

d. Peta Strategi Sekretariat Utama BPS

Tujuh sasaran strategis Sekretariat Utama BPS memiliki keterkaitan dan kemampuan saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BPS tahun 2015-2019. Guna mengkomunikasikan sasaran strategis tersebut kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Utama BPS, maka disusunlah peta strategi dengan menggunakan 4 perspektif dalam *Balanced Scorecard*, yaitu:

- Perspektif *Customer*

Merupakan perspektif yang berorientasi pada peminfaat atas layanan yang dihasilkan oleh Sekretariat Utama BPS.

- Perspektif *Stakeholder*

Penentuan perspektif ini yaitu mengidentifikasi siapa yang merupakan *stakeholder* organisasi dan menentukan kepentingan khusus apa yang kira-kira dimiliki para *stakeholder*. Selain itu perlu memperhatikan kedudukan masing-masing *stakeholder* terhadap keputusan dan tindakan institusi serta bagaimana mengelola hubungan yang baik dengan *stakeholder* tersebut. Mengingat *stakeholder* Sekretariat Utama BPS dibagi 2 (dua) yaitu *stakeholder internal (subject matter)* dan *stakeholder eksternal* (Bappenas, Kemenkeu, Kemenpan dan RB, dll).

- Perspektif *Internal Business Process*

Merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan untuk menciptakan produk/jasa dalam rangka memenuhi harapan pemanfaat layanan dan *stakeholder* atas produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh Sekretariat Utama BPS.

- Perspektif *Learning and Growth*

Merupakan perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

e. Kebijakan Sekretariat Utama BPS

Arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama BPS mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di bidang administrasi serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada berbagai kegiatan administrasi;
2. Mengembangkan sistem administrasi terpadu secara bertahap untuk mendukung kelancaran tugas administrasi;
3. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima;
4. Melaksanakan suatu upaya untuk mentransformasi statistik dalam suatu program yang disebut *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS).

f. Program yang Dilaksanakan oleh Sekretariat Utama BPS

Program yang dijalankan oleh Sekretariat Utama ada 2 (dua) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Program DMPTTL BPS

bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi pegawai. Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama BPS. Kedua program generik ini juga dilakukan di lingkungan BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Sekretariat Utama BPS telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik yaitu sebagai berikut:

IKU yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam IKU pada tingkat unit kerja Eselon II. Karena itu setiap unit kerja Eselon II mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Sestama. Peranan unit kerja Eselon II di lingkungan Sestama pada setiap penyusunan target indikator Sestama dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretaris Utama

Tujuan/Sasaran/Indikator	Biro Bina Program	Biro Keuangan	Biro Kepegawaian	Biro Hukum	Biro Humas dan Umum	Pusdiklat	STIS	Poiteknik Statistika
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
Tujuan 1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel								
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*	*						
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS								
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	*							
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	*	*	*	*	*	*	*	*
Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan								
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*	*						
Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif								
Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi				*				
Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.				*				
Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik								
Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga			*					
Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu							*	
Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik						*		

Tujuan/Sasaran/Indikator		Biro Bina Program	Biro Keuangan	Biro Kepegawalan	Biro Humas dan Hukum	Biro Umum	Pusdiklat	Politeknik Statistika STIS
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Pegawai Yang Memenuhi Standar Kompetensi Tertentu			*				
	Persentase Kementrian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer			*				
	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementrian/Lembaga			*				
Meningkatnya Layanan Perkantoran								
	Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan					*		
Tujuan 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana BPS								
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS					*		
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS								
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS					*		
	Kepuasan Pegawai Terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS							
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan					*		

2.3. Anggaran Tahun 2018

Dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 658,064 miliar. Pagu tersebut dibagi kedalam dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp 592,34 miliar dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) sebesar Rp 65,72 miliar. Sejak 2018, Program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP CERDAS) dibiayai menggunakan Rupiah Murni tidak lagi dibiayai menggunakan Pinjaman Luar Negeri dan Rupiah Murni Pendamping.

**Tabel 2. Pagu Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Kegiatan (Unit Eselon II)
Tahun Anggaran 2018 (Juta Rupiah)**

Program / Kegiatan (Unit Eselon II)	Pagu
(1)	(2)
01 DMPTTL	592.342
2881. Biro Bina Program	108.604
2882. Biro Humas dan Hukum	10.616
2883. Biro Kepegawaian	10.766
2884. Biro Keuangan	241.391
2885. Biro Umum	87.285
2887. Pusdiklat	63.469
2888. Politeknik Statistika STIS	70.212
02 PSPA	65,72
2890. Biro Umum	65,72
Total	658.064

Biro Keuangan mendapatkan alokasi pagu yang paling besar karena adanya Gaji dan Tunjangan pegawai. Biro umum sebagian besar alokasinya untuk biaya operasional perkantoran seperti biaya untuk biaya satpam, mitra pegawai, pemeliharaan/perawatan

gedung, peralatan dan mesin dll. Biro Bina Program alokasi pagu terbesar untuk pembiayaan STATCAP CERDAS. Pusdiklat pembiayaan terbesar untuk kegiatan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan, sedangkan Politeknik Statistika STIS untuk pembiayaan pembelajaran mahasiswa.

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2018

Pada awal tahun 2018, Sekretariat Utama BPS telah menetapkan target yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan Sekretariat Utama BPS dalam memenuhi tugasnya di tahun 2018. Target tersebut dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Utama yang merupakan bentuk komitmen Sekretaris Utama kepada kepala BPS. Perjanjian Kinerja untuk Sekretariat Utama dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama BPS selepas DIPA anggaran 2018 ditetapkan. Berikut tabel penetapan kinerja Sekretariat Utama BPS tahun 2018 untuk masing-masing indikator sasaran.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
1.1 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Poin	78,00
	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Poin	76,00
1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	100 (WTP)
1.3. Pelaksanaan penataan	Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	80,00

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	Persentase terselesainya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100,00
1.4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	5.850
	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	Persen	98,00
	Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	Persen	95,00
	Persentase Pegawai Yang Memenuhi Standar Kompetensi Tertentu	Persen	70,00
	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer	Persen	70,00
	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	Persen	30,00
1.5. Meningkatnya Layanan Perkantoran	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan	Persen	80,00
Tujuan 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80,00
2.1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80,00

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kepuasan Pegawai Terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	100,00
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

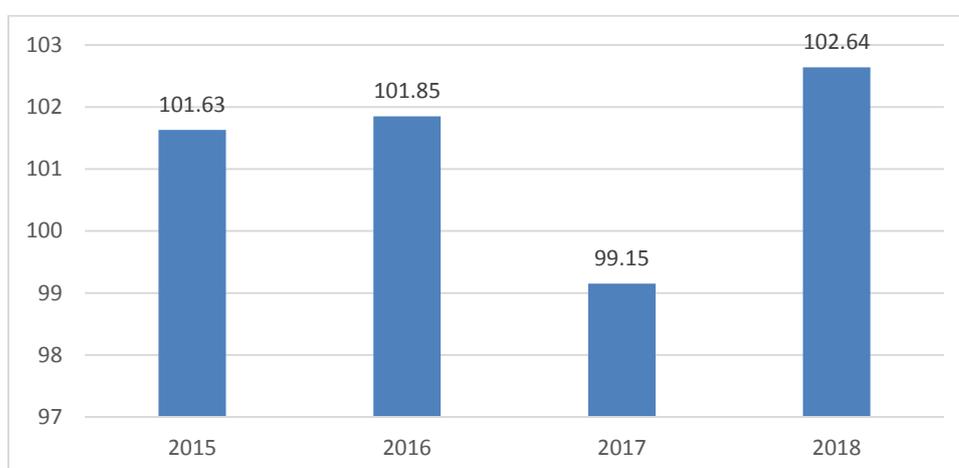
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja Sekretariat Utama BPS (Sestama) 2018 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2018. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2018 dan data realisasinya dapat diperoleh.

**Tabel 4. Rata-rata Capaian Kinerja Sestama Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis
Tahun 2017**

Tujuan/Sasaran/Indikator	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)
1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	1	100,00
1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	2	98,08
1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	1	100,00
1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	2	100,00
1.4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	6	105,52
1.5. Meningkatnya Layanan Perkantoran	1	100,00
2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS	1	120,00
2.1. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	3	102,76
Rata Rata Tujuan		110,00
Rata Rata Sasaran		102,64

Secara umum, kinerja Sestama Tahun 2018, yang merupakan tahun keempat pelaksanaan periode Renstra Sestama 2015-2019 bisa dikatakan berhasil dengan rata-rata pencapaian tujuan sebesar 110,00 persen sedangkan rata-rata sasaran strategis mencapai 102,64 persen. Jika dilihat perkembangan capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan, pada tahun 2018 terjadi peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 sebesar 101,63 persen, dan meningkat menjadi 101,85 persen di tahun 2016, namun turun menjadi 99,15 persen di tahun 2017 dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 102,64 persen.



Gambar 6. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 – 2018 (persen)

Tujuan 1. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya sebagaimana yang tertera pada Tujuan 4 Renstra BPS 2015-2019. Dalam pelaksanaannya tujuan BPS tersebut diturunkan pada dua Unit Kerja eselon I yaitu Sestama dan Inspektorat Utama. Pada Sestama Tujuan BPS tersebut dinyatakan dalam tujuan pertama dokumen PK Sestama tahun 2018.

Akuntabilitas yang dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setiap Tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK BPS tersebut berdasarkan:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- Efektivitas sistem pengendalian intern; dan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan Pertama Sekretariat Utama: Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel Tahun 2018

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel					
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	100,00	WTP	0
1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	78,00	75,01	96,17	74,96	0,05
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	76,00	77,51	101,98	77,20	0,31
Rata Rata Sasaran	99,07				
1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan					

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	100,00	WTP	0
Rata Rata Sasaran			100,00		
1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif					
Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	80,00	80	100,00	75,00	5
Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Rata Rata Sasaran			100,00		
1.4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik					
Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5860	6175	105,56	5773	5,37
Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	98,00	98,00	100,00	98,00	0
Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	95,00	98,9	104,07	95,00	3,9
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	70,00	78,43	112,04	75,43	3
Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat	70,00	64,00	91,43	58,00	6

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fungsional Statistik dan pranata komputer					
Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	30,00	36,00	120,00	25,00	0
Rata Rata Sasaran			105,52		
1.5. Meningkatnya Layanan Perkantoran					
Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	100,00	100,00	100,00	80,00	0
Rata Rata Sasaran			100,00		

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan BPS memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap akuntabilitas keuangan BPS pada tahun 2016. Hasil penilaian yang diserahkan pada tahun 2017 ini memperbaiki penilaian capaian BPS dibanding tahun 2016, karena pada tahun 2016 (yang merupakan penilaian tahun 2015) hasil pemeriksaan BPS terhadap laporan keuangan BPS memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perkembangan predikat akuntabilitas keuangan BPS dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 7. Predikat Akuntabilitas Keuangan BPS Tahun 2012 – 2017

SS1.1 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Sebagaimana tujuan pertama dari IKU Sestama, sasaran strategis “**Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS**” merupakan hasil *cascading* dari Sasaran Strategis yang sama pada Dokumen PK BPS Tahun 2018. Meskipun memiliki deskripsi sasaran yang sama, namun tidak semua indikator di dalamnya diturunkan menjadi tanggung jawab Sestama. Dari tiga indikator yang menjadi ukuran keberhasilan sasara BPS tersebut, dua diantaranya menjadi tanggung jawab Sestama yaitu : Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB” dan “Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB”

Telah dijelaskan di atas, bahwa bukan hanya akuntabilitas keuangan saja yang perlu diperhatikan, melainkan juga akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja paling tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik oleh pemerintah, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja maka BPS diharapkan telah memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPS.

Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB

BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di pusat maupun di daerah. Pada tahun 2017 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 74,96 atas pelaksanaan SAKIP BPS, sedangkan pada tahun 2018 BPS mendapatkan skor 75,01 atau naik tipis sebesar 0,05. Hasil penilaian tersebut lebih kecil dari target 2018 yang sebesar 78,00 point atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 96,16 persen.

Rekomendasi diberikan oleh Kemen PAN dan RB untuk pelaksanaan AKIP di tahun selanjutnya antara lain:

- (1) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja sebelumnya;
- (2) Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS masih perlu diperbaiki karena ada beberapa IKU untuk tingkat lembaga BPS masih dijumpai indikator kinerja output;
- (3) *Cascading* Perjanjian Kinerja perlu penataan kembali agar selaras antara kinerja bawahan dengan atasannya;
- (4) Pelaksanaan evaluasi AKIP di seluruh unit kerja eselon I oleh Inspektorat Utama.

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB

Kegiatan pada masing-masing area perubahan RB BPS melekat pada *subject matter* dan unit kerja pendukung terkait, misalnya evaluasi harmonisasi peraturan perundang-undangan secara berkala yang dilakukan oleh Biro Humas dan Hukum, pembangunan sistem dan uji coba SKP *online* pada Area Perubahan Penataan Tatalaksana dengan melibatkan Biro Bina Program, Biro Kepegawaian dan Direktorat Neraca Produksi sebagai penanggungjawab, pengembangan SDM berbasis kompetensi oleh Biro Kepegawaian, implementasi SPIP oleh Inspektorat, peningkatan pelayanan publik oleh Direktorat Diseminasi Statistik, dan Reviu Renstra BPS 2015-2019 oleh Biro Bina Program.

Pada tahun 2017 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 77,20 atas pelaksanaan RB BPS.

Sedangkan pada tahun 2018 BPS mendapatkan skor 77,51. Hasil penilaian ini lebih besar dari target 2018 yang sebesar 76,00 point atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 101,98 persen. Jika dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2017, capaian kinerja indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,31 persen.

Rekomendasi yang diberikan oleh KemenPAN dan RB untuk pelaksanaan RB di tahun selanjutnya antara lain:

- (1) Perbaiki tata kelola pelaksanaan reformasi birokrasi, lebih focus pada pelaksanaan kegiatan di masing-masing Kelompok Kerja (POKJA);
- (2) Peningkatan kinerja individu belum didasarkan pada kinerja organisasi. Kondisi ini mengakibatkan kinerja pegawai pada setiap tingkatan tidak selalu selaras dengan kinerja yang diharapkan organisasi.;
- (3) Peningkatan pelaksanaan pengendalian internal;
- (4) Peningkatan pemahaman Zona Integritas di lingkungan BPS;

SS1.2 Meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Penjelasan untuk sasaran ini dapat dilihat pada penjelasan tujuan 1. mengingat indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran ini sama dengan indikator yang digunakan pada tujuan 1.

SS1.3 Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif

Sasaran Strategis ini bukan merupakan *hasil cascading* dari IKU BPS melainkan merupakan Sasaran strategis terkait dari Tugas dan Fungsi Sestama yang kinerjanya diukur melalui dua indikator pada pelaksanaannya diturunkan kepada Biro Humas dan Hukum. Ada dua indikator untuk mengukur sasaran ini, yaitu indikator tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi dan indikator persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS. Rata-rata capaian Sasaran Pelaksanaan Penataan Kelembagaan dan Komunikasi Eksternal dan Internal Yang Efektif di tahun 2018 sebesar 100 persen. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 realisasi indikator tingkat kehadiran peserta

eksternal pada aktivitas sosialisasi naik 5 persen, dari semula 75 persen menjadi 80 persen.

SS1.4 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga

Dari target sebanyak 5850 orang pada PK 2018, realisasi indikator ini mencapai 6175 orang, hal ini menunjukkan capaian yang sangat baik sebesar 105,56 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang mencapai 5773 orang, maka dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja indikator ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen. Hal ini sebagai akibat dari penyelenggaraan impasing jabatan fungsional statistisi maupun pranata komputer.

Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu

Dari target sebesar 98 persen pada PK 2018, realisasi indikator ini dapat memenuhi target, hal ini menunjukkan capaian yang memuaskan sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang juga mencapai 98 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator ini tidak mengalami peningkatan, namun sudah menunjukkan hasil capaian yang maksimal yaitu 100 persen.

Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik

Dari target sebesar 95 persen pada PK 2018, realisasi indikator ini mencapai 98,8 persen, hal ini menunjukkan capaian yang melebihi target yang diperkirakan yaitu sebesar 104,07. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang mencapai 95 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan realisasi sebesar 3,8 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kualitas proses diklat sehingga materi semakin mudah diserap oleh peserta.

Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu

Dari target sebanyak 70 persen pada PK 2018, realisasi indikator ini mencapai 78,43 persen, hal ini menunjukkan capaian yang melebihi target yaitu sebesar 112,04 persen. Realisasi pada indikator ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 75,43 persen atau naik 3 persen. Hal ini dikarenakan adanya berbagai pelatihan baik teknis survei maupun pelatihan non teknis sebagai bentuk peningkatan kompetensi pegawai.

Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer

Dari target sebanyak 70 persen pada PK 2018, realisasi indikator ini hanya mencapai 64 persen, sehingga capaian kinerja indikator ini hanya sebesar 91,43 persen. Realisasi pada indikator ini naik dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 6 persen (realisasi 2017 sebesar 58 persen)

Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga

Dari target sebanyak 30 persen pada PK 2018, realisasi indikator ini mencapai 36 persen, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 120 persen. Kenaikan capaian kinerja pada indikator ini sebagai akibat dari penyelenggaraan impasing jabatan fungsional yang telah ditur oleh Kementerian PAN dan RB.

SS1.4 Meningkatnya Layanan Perkantoran

Pada sasaran strategis ini, hanya terdapat satu indikator yaitu persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan. Target PK tahun 2018 sebesar 80 persen dan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 80 persen. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100 persen, sama dengan dengan realisasi tahun 2017. Beberapa cara yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja diantaranya adalah cepat respon terhadap keluhan pegawai atas keluhan yang muncul, senantiasa melakukan perawatan/pemeliharaan atas gedung, peralatan dan mesin serta jaminan keamanan, pelayanan dukungan pekerjaan oleh pekerja mitra BPS (*Cleaning Service/Office Boy*)

Tujuan 2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS

Tujuan kedua adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Badan Pusat Statistik. Indikator dari tujuan kedua ini ingin melihat berapa persen pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS. Jika dilihat dari realisasi pada tahun 2018 sebesar 97,7 persen yang lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 93,86 persen atau naik 3,84 persen, artinya bahwa pemenuhan sarana dan prasarana di BPS sudah cukup baik. Jika dibandingkan dengan target PK 2018 yang hanya sebesar 80 persen, maka capaian kinerja pada indikator tujuan ini sebesar 120 persen.

SS2.1 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Penjelasan untuk indikator ini dapat dilihat pada penjelasan tujuan 2. Mengingat indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan indikator ini sama dengan indikator yang digunakan pada tujuan 2.

Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS

Untuk melihat keberhasilan tercapainya tujuan 2, tidak hanya melihat dari segi kepuasan pengguna layanan, namun kualitas sarana dan prasarana BPS juga dapat dilihat dari kepuasan pengguna terhadap kualitas sarana dan prasarana di lingkungan BPS. Pengguna dalam lingkungan BPS ini berarti seluruh pegawai BPS, yang mana tingkat kepuasannya terhadap kualitas sarana dan prasarana BPS pada tahun 2018 sebesar 100 persen. Hal ini berarti seluruh pegawai BPS menyatakan puas terhadap kualitas sarana dan prasarana BPS. Realisasi sebesar 100 persen ini sebanding dengan target yang tercantum di PK 2018 sebesar 100 persen.

Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan

Indikator sasaran berikutnya berupa persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan. Jika melihat realisasi tahun 2018, pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang terselesaikan sebesar 88,3 persen. Jika dilihat dari target yang tertuang di PK 2018 sebesar 100 persen, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini sebesar 88,3 persen atau belum memenuhi target. Beberapa kendala yang dihadapi adalah terlambatnya proses pembayaran atas pengadaan yang sudah dilakukan karena kesalahan administrasi.

3.2 Capaian kinerja Tahun 2018 terhadap Target Renstra 2018 dan 2019

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sestama BPS Tahun 2018 dengan Target Renstra Tahun 2018 dan 2019

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2018	Capaian Thd Target Renstra (%)	
	2018	2019		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel					
1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2018	Capaian Thd Target Renstra (%)	
	2018	2019		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	81,00	84,00	75,01	92,60	89,30
2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	77,00	79,00	77,51	100,66	98,11
SS1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan					
1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
SS1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif					
1. Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	75,00	75,00	80	106,67	106,67
2. Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SS1.4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik					
1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5815	8963	6175	106,19	68,89
2. Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	99,00	99,00	98,00	98,99	98,99

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2018	Capaian Thd Target Renstra (%)	
	2018	2019		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	-	-	95,00	-	-
4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	-	-	75,43	-	-
5. Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	-	-	58,00	-	-
6. Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	-	-	25,00	-	-
SS1.5. Meningkatnya Layanan Perkantoran					
1. Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtangaan	91,00	91,00	80,00	87,91	87,91
Tujuan 2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS					
1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65,00	65,00	97,69	120,00	120,00
SS2.1. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS					

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2018	Capaian Thd Target Renstra (%)	
	2018	2019		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65,00	65,00	97,69	120,00	120,00
2. Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	-	-	100,00	-	-
3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100,00	100,00	88,28	88,28	88,28

Jika dibandingkan realisasi tahun 2018 terhadap target Renstra 2018, capaian kinerja seluruh indikator sasaran strategis Sestama BPS untuk Periode Renstra 2015-2019 yang realisasi kinerjanya telah melampaui target Renstra 2018 sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB,
2. Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi
3. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga,
4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.

Indikator sasaran strategis yang realisasi kinerjanya belum melampaui target Renstra di tahun 2018 sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB,
2. Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu
3. Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan
4. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 Sestama BPS menerima pagu sebesar Rp 658,06 miliar terdiri dari Program DMPTTL sebesar Rp. 592,34 miliar dan Program PSPA sebesar Rp. 65,72 miliar. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sestama BPS menggunakan anggaran Program DMPTLL sebesar Rp. 489,18 miliar (82,58 persen) dan realisasi Program PSPA sebesar Rp. 53,74 miliar (81,77 persen). Total penggunaan anggaran Sestama di tahun 2018 sebesar Rp 542,92 miliar dengan kata lain realisasi anggaran Sestama BPS pada tahun 2018 mencapai 82,50 persen. Realisasi anggaran tahun 2018 ini lebih kecil dibandingkan persentase realisasi tahun 2017 sebesar 91,13 persen.

Dari sisi jenis belanja, Sekretariat Utama BPS menerima Rp. 365,52 miliar belanja operasional dalam program DMPTTL dan Rp. 293,54 belanja Non Operasional (termasuk program PSPA). Realisasi belanja operasional tahun 2018 sebesar 89,20 persen sedangkan realisasi belanja non operasional 74,18 persen.

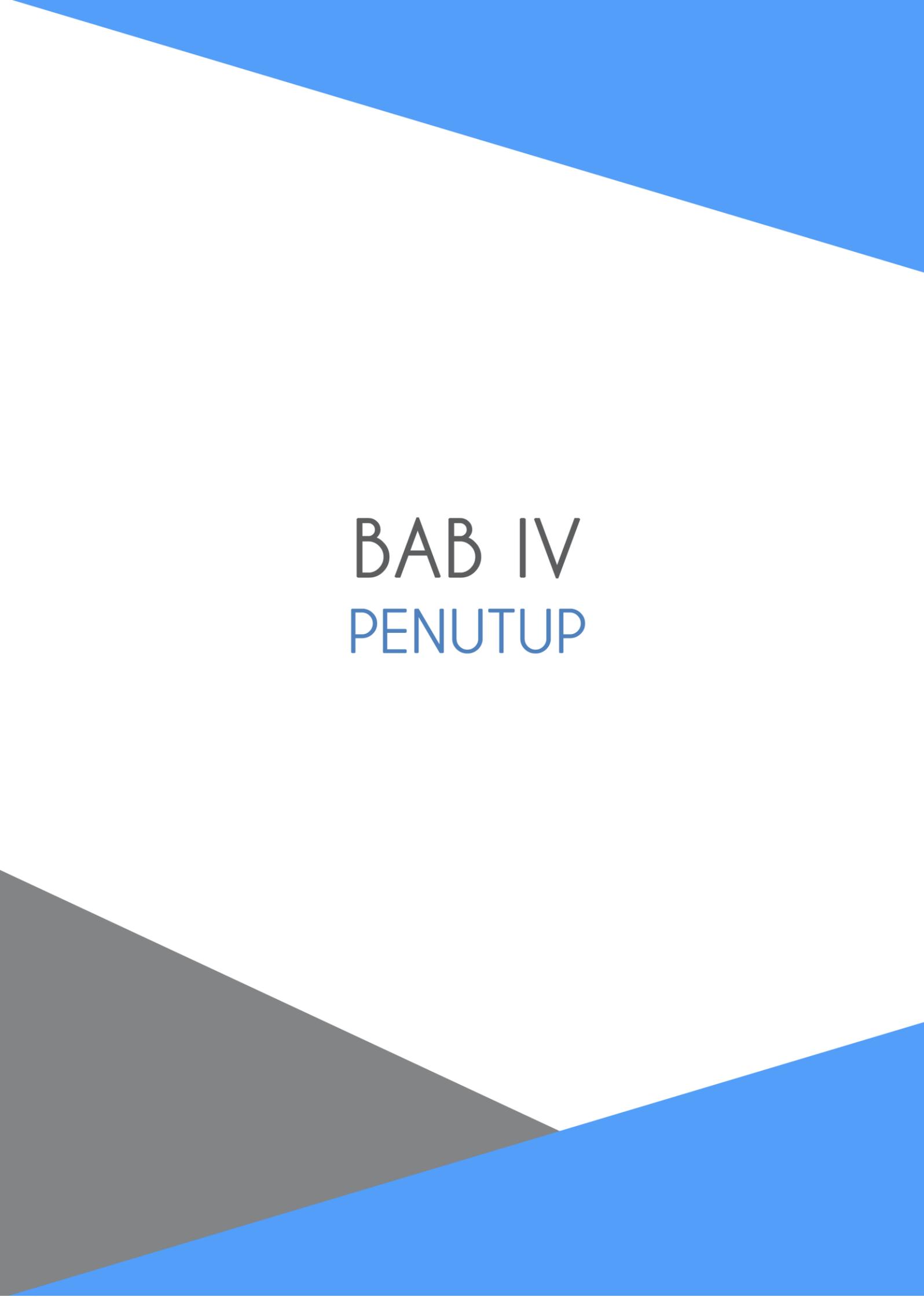
Tabel 7. Realisasi Pagu Sekretariat Utama menurut jenis Belanja TA 2018 (Miliar Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Realisasi /Pagu (%)
(1)	(2)	(5)	(6)
Operasional	364,52	325,17	89,20
Non Operasional	293,54	217,75	74,18
Total	658,06	542,92	82,50

Dari sisi pagu kegiatan (unit eselon II), realisasi pagu terendah ada di Biro Bina Program (53,49 persen) diantaranya karena serapan pembiayaan untuk STATCAP CERDAS yang masih rendah serta pembiayaan untuk Reformasi Birokrasi (RB) yang pelaksanaannya melibatkan unit eselon II lainnya tetapi tanggung jawab kegiatan dan anggaran di Biro Bina Program.

**Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Kegiatan/Unit
Eselon II Tahun 2018 (Miliar Rupiah)**

Program / Kegiatan (Unit Eselon II) (1)	Pagu (2)	Realisasi (3)	Persentase Realisasi (4)
01 DMPTTL	592.342	489.177	82,58
2881. Biro Bina Program	108.604	58.090	53,49
2882. Biro Humas dan Hukum	10.616	8.045	75,78
2883. Biro Kepegawaian	10.766	8.461	78,59
2884. Biro Keuangan	241.391	215.275	89,18
2885. Biro Umum	87.285	76.584	87,74
2887. Pusdiklat	63.469	57.910	91,24
2888. Politeknik Statistika STIS	70.212	64.814	92,31
02 PSPA	65,72	53.744	81,77
2890. Biro Umum	65,72	53.744	81,77
Total	658.064	542.920	82,50



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Kinerja Sestama BPS pada tahun 2018 dapat dikatakan memuaskan dengan capai kinerja tujuan sebesar 110,00 persen naik jika dibandingkan capaian kinerja tujuan tahun 2017 sebesar 108,66 persen. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018 sebesar 102,64 persen naik jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 99,17. Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Selain itu pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya juga harus ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja antara lain :

Penajaman IKU

Agar pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran Sestama BPS menjadi lebih relevan, perlu dilakukan penajaman terhadap beberapa IKU. Penajaman IKU bukanlah hal yang mudah mengingat penajaman memerlukan kesiapan, baik dari sisi SDM maupun anggaran yang harus dipenuhi agar IKU yang telah disusun bukan saja dapat diukur tetapi juga dapat dicapai keberhasilannya.

Beberapa indikator sasaran yang perlu dipertajam terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan dalam pengukuran pembinaan SDM perlu dipertajam. Pembinaan perlu dilakukan secara terus menerus agar SDM BPS tetap memenuhi standar kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membina jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer, kinerja BPS dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan tersebut di seluruh instansi pemerintah juga harus terukur.

Penajaman Target Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa indikator realisasinya jauh melampaui target akhir Renstra 2015-2019. Agar kinerja Sestama BPS terus meningkat, maka perlu dilakukan penajaman (peningkatan) terhadap target kinerja pada beberapa indikator. Penajaman diharapkan menjadi pendorong bagi BPS untuk berkinerja jauh lebih baik.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BPS
TAHUN 2015-2019

Instansi	:	Sekretariat Utama
Visi	:	Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Administrasi yang efektif, efisien, terpadu dan berkualitas
Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan layanan administrasi yang prima, berkualitas, efektif, dan efisien bagi pemanfaat layanan dan <i>stakeholder</i>; 2. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan administrasi dalam kerangka pelaporan yang andal, efektif, dan efisien; dan 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir dan sistem administrasi yang berlaku.

Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB 1.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB 	Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja	Program DMTTTL dan PPAA
	2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Program DMPTTL

Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi 2. Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS 	Meningkatkan kegiatan sosialisasi eksternal di bidang statistic dan koordinasi penyusunan produk hukum	Program DMPTTL
	4. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga 2. Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu 3. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik 4. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu 5. Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer 5. Persentase terpenuhinya 	Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja	Program DMPTTL

Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lem baga		
	5. Meningkatnya Layanan Perkantoran	1. Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan	Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia	Program DMPTTL
2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	1. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 2. Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS 3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Program PSPA

LAMPIRAN 2

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Adi Lumaksono M.A.
Jabatan : Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Suhariyanto
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Suhariyanto
NIP. 19610615 198312 1 001

Jakarta, 23 Maret 2018

Pihak Pertama

Dr. Adi Lumaksono M.A.
NIP. 19600831 198302 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT UTAMA

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Point	78
	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Point	76
Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	80
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100
Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	5850
	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	Persen	98
	Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	Persen	85
	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	Persen	70
	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	Persen	70
	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan	Persen	30

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pranata Komputer Kementerian/Lembaga		
Meningkatnya Layanan Perkantoran	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	Persen	80
Tujuan 2. Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80
	Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	100
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Program**Anggaran**

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp. 577.610.181.000,- |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 67.567.014.000,- |
| Jumlah | Rp. 645.177.195.000,- |

Pihak Kedua



Dr. Suhariyanto
NIP. 19610615 198312 1 001

Jakarta, 23 Maret 2018

Pihak Pertama



Dr. Adi Lumaksono M.A..
NIP. 19600831 198302 1 002

LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPS
TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	Trw I	0	0	0,00
			Trw II	0	0	0,00
			Trw III	0	0	0,00
			Trw IV	WTP	WTP	100,00
1.1 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Poin	Trw I	0,00	0,00	0,00
			Trw II	0,00	0,00	0,00
			Trw III	0,00	0,00	0,00
			Trw IV	78,00	75,01	96,16
	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Poin	Trw I	0,00	0,00	0,00
			Trw II	0,00	0,00	0,00
			Trw III	0,00	0,00	0,00
			Trw IV	76,00	77,51	101,98
1.2 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	Trw I	0,00	0,00	0,00
			Trw II	0,00	0,00	0,00
			Trw III	0,00	0,00	0,00
			Trw IV	WTP	WTP	100,00
1.3 Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	Trw I	80,00	80,00	100,00
			Trw II	80,00	80,00	100,00
			Trw III	80,00	80,00	100,00
			Trw IV	80,00	80,00	100,00
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	Trw I	25,00	25,00	100,00
			Trw II	50,00	50,00	100,00
			Trw III	75,00	75,00	100,00
			Trw IV	100,00	100,00	100,00
1.4 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	Trw I	5400	5400	92,31
			Trw II	5550	5642	96,44
			Trw III	5700	5817	99,44
			Trw IV	5850	6175	105,56
	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	Persen	Trw I	0,00	0,00	0,00
			Trw II	0,00	0,00	0,00
			Trw III	0,00	0,00	0,00
			Trw IV	98,00	98,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	Persen	Trw I	0	0	0
			Trw II	0	0	0
			Trw III	95	98,77	104,07
			Trw IV	95	98,77	104,07
	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	persen	Trw I	0,00	0,00	0,00
			Trw II	0,00	0,00	0,00
			Trw III	0,00	0,00	0,00
			Trw IV	70,00	78,43	112,04
	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	Persen	Trw I	55	55	78,57
			Trw II	60	59	84,29
			Trw III	65	64	91,43
			Trw IV	70,00	64	91,43
	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	Persen	Trw I	25,00	25,00	83,33
			Trw II	27,00	28,00	93,33
			Trw III	29,00	31,00	103,3
			Trw IV	30,00	36,00	120,00
1.5 Meningkatnya Layanan Perkantoran	Persen	Trw I	0,00	0,00	0,00	
		Trw II	0,00	0,00	0,00	
		Trw III	0,00	0,00	0,00	
		Trw IV	80,00	80,00	100,00	
Tujuan 2.: Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persen	Trw I	0,00	0,00	0,00	
		Trw II	0,00	0,00	0,00	
		Trw III	0,00	0,00	0,00	
		Trw IV	80,00	80,00	100,00	
2.1 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persen	Trw I	0,00	0,00	0,00	
		Trw II	0,00	0,00	0,00	
		Trw III	0,00	0,00	0,00	
		Trw IV	80,00	80,00	100,00	
	Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	Trw I	0,00	0,00	0,00
			Trw II	0,00	0,00	0,00
			Trw III	0,00	0,00	0,00
			Trw IV	100,00	100,00	100,00
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	Trw I	25,00	21,37	21,37
			Trw II	50,00	39,95	39,95
			Trw III	75,00	62,75	62,75
			Trw IV	100,00	88,28	88,28

LAMPIRAN 4

Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Sekretariat Utama
Badan Pusat Statistik
Keadaan: Akhir Tahun 2018

No (1)	Nama Jabatan Fungsional (2)	Jumlah Pegawai (3)
1	Analisis Kepegawaian Madya	2
2	Analisis Kepegawaian Muda	15
3	Analisis Kepegawaian Pelaksana	3
4	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	3
5	Analisis Kepegawaian Penyelia	1
6	Analisis Kepegawaian Pertama	7
7	Arsiparis Pelaksana	1
8	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	4
9	Arsiparis Pertama	1
10	Asisten Ahli	27
11	Auditor Muda	1
12	Auditor Pertama	1
13	Dokter Gigi Muda	2
14	Dokter Madya	1
15	Dokter Muda	1
16	Lektor	30
17	Lektor Kepala	13
18	Peneliti Madya	1
19	Penyuluh Hukum Muda	2
20	Penyuluh Hukum Pertama	3
21	Perawat Gigi Penyelia	1
22	Perawat Muda	1
23	Perencana Muda	3
24	Perencana Pertama	6
25	Pranata Humas Penyelia	2
26	Pranata Komputer Madya	1
27	Pranata Komputer Pertama	6
28	Statistisi Muda	9
29	Statistisi Pelaksana	4
30	Statistisi Pelaksana Lanjutan	1
31	Statistisi Pertama	18
32	Widyaiswara Madya	10
33	Widyaiswara Muda	12
34	Widyaiswara Pertama	1
35	Widyaiswara Utama	1
	JUMLAH	195

LAMPIRAN 5

JUMLAH PEGAWAI BPS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN 2018 (Akhir Tahun)

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekretaris Utama	1				1
Biro Bina Program	-	23	23	2	48
Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	-	18	31	21	70
Biro Kepegawaian	-	18	36	9	63
Biro Keuangan	-	16	38	25	79
Biro Umum	-	10	38	68	116
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	4	30	21	17	72
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	16	66	13	14	109
Jumlah	21	181	200	156	558

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta-10710

Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021)3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email : bpsHQ@bps.go.id